

Strategi Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives Tahun 2020

Alfiana Nur Az Zahra¹

Program Studi Hubungan Internasional¹
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta¹
[alfianana@upnvj.ac.id¹](mailto:alfianana@upnvj.ac.id)

Laode Muhamad Fathun²

Program Studi Hubungan Internasional²
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta²
[laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id²](mailto:laodemuhammadfathun@upnvj.ac.id)

Garcia Krisnando Nathanael³

Program Studi Hubungan Internasional³
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta³
[garcia@upnvj.ac.id³](mailto:garcia@upnvj.ac.id)

Abstract

Health diplomacy is carried out by various countries in the world to overcome the Covid-19 pandemic, especially Indonesia through Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiatives by 2020. The concept of global health diplomacy and health security is used to analyze the research problem. The method used in this research is descriptive qualitative using three stages of data analysis, namely data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results shows that the diplomacy carried out by Indonesia through FPGH in 2020 aims to create affordable health access and ensure the availability of vaccines as one of the steps to accelerate the pandemic. Covid-19 consciously increases the ability of countries to collaborate in dealing with the impact of inequality and gap by involving multilateral cooperation as the main factor in realizing health security. These activities are demonstrated through international meetings such as the UN General Assembly, WHO, WHA, and ASEAN and involve the COVAX Facility to ensure fair and equal distribution of vaccines.

Keywords: *FPGH, health diplomacy, health security, pandemic, Covid19*

Abstrak

Upaya diplomasi kesehatan dijalankan oleh berbagai negara di dunia untuk mengatasi pandemi Covid-19, khususnya Indonesia melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives (FPGH) pada tahun 2020. Konsep diplomasi kesehatan dan keamanan kesehatan digunakan untuk menganalisis permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan tiga tahapan analisis data, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia melalui FPGH sepanjang tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan akses kesehatan yang terjangkau dan memastikan ketersediaan vaksin sebagai salah satu langkah percepatan pandemi. Covid-19 secara sadar meningkatkan kemampuan negara berkolaborasi menghadapi dampak kesenjangan dan ketidaksejahteraan dengan melibatkan kerjasama multilateral sebagai faktor utama dalam mewujudkan keamanan kesehatan Kegiatan tersebut ditunjukkan melalui pertemuan internasional seperti

Sidang Majelis Umum PBB, WHO, WHA, dan ASEAN serta melibatkan COVAX Facility untuk menjamin distribusi vaksin yang adil dan setara.

Kata Kunci: FPGH, diplomasi kesehatan, keamanan kesehatan, pandemic, covid-19

1. Pendahuluan

Kesehatan merupakan isu penting dalam kehidupan sehari-hari karena berkaitan dengan kualitas hidup manusia, di mana fisik, mental, dan kehidupan sosial berjalan sejahtera. Selain itu, kesehatan terikat dengan interaksi kompleks antara faktor sosial dan ekonomi serta lingkungan fisik dan kebiasaan individu. Kesehatan secara global bermakna pemerataan kesehatan bagi semua orang di dunia dengan menekankan transnasional masalah kesehatan dan pencegahan penyakit. Dunia saat ini telah dilanda fenomena penularan penyakit berskala global yang dikenal dengan pandemi Covid-19. Seluruh sektor kehidupan seakan lumpuh karena kebijakan pembatasan mobilitas yang ditetapkan negara. Sejak wabah SARS tahun 2003, ancaman keamanan kesehatan global terus menunjukkan peningkatan dengan adanya wabah H5N1 (flu burung), pandemi H1N1 (flu babi), MERS-Cov, Ebola, dan Zika. Fenomena tersebut menjadi peringatan masalah kesehatan global ditandai dengan munculnya berbagai efek sosial dan ekonomi yang meningkatkan kerentanan hidup manusia sehingga kesehatan menjadi subjek perhatian dunia agar akses hidup sehat dapat diterima oleh setiap golongan masyarakat (Taubenberger & Morens, 2006).

Fenomena transnasionalisme membuat interaksi lintas batas negara meningkat. Minimnya keterlibatan dan kontrol negara, kegiatan ini sering dikaitkan dengan gerakan yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, dan politik untuk sebuah negara karena jaringan ada telah berkontribusi pada pembangunan masyarakat sipil global. Transnasionalisme ekonomi yang mengglobal telah meningkatkan perdagangan dan perjalanan internasional yang semakin cepat akan meningkatkan resiko penyebaran penyakit menular sehingga setiap negara harus mengambil langkah untuk melindungi warganya.

Penerapan keilmuan kesehatan masyarakat merupakan cara untuk mencapai kekuatan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, komunitas, dan populasi melalui promosi kesehatan gaya hidup sehat, penelitian penyakit, serta mendeteksi, mencegah, dan menangani penyakit menular. Tindakan ini merupakan usaha bersama antara para praktisi kesehatan dan pembuat kebijakan yang diterapkan melalui kelompok kecil di lapisan masyarakat seperti individu, keluarga, komunitas, hingga populasi di daerah tertentu (World Health Organization, 2017). Pemerintah dunia saat ini harus menjadi lebih peduli tentang bahaya biologis setelah banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa masalah kesehatan disebabkan oleh wabah penyakit menular. Tindakan politis tersebut dikenal sebagai gagasan yang disebut dengan "*health security*" atau perluasan isu masalah keamanan kesehatan di luar batas wilayah negara.

Menurut WHO, tidak ada negara yang siap dalam menangani pandemi. Adanya kesenjangan dalam kemampuan negara dalam merespon pandemi yang menyebar secara cepat dalam tingkat nasional dan global. Banyaknya kesenjangan yang nampak di permukaan dalam kesiapsiagaan pandemi dan menghambat pelaksanaan keamanan kesehatan. Di tingkat nasional, kesenjangan terletak pada kapasitas sistem penanganan yang belum kuat, sistem kesehatan yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang belum efektif, dan kemampuan

komunikasi publik yang belum optimal. Sedangkan pada level global, kesenjangan berada pada kemampuan dalam sistem pencegahan dan penanganan yang terbatas, kapasitas sistem kesehatan dan rantai pasokan yang masih lemah, koordinasi kepemimpinan global yang belum optimal, serta kondisi penelitian yang belum kuat.

WHO sebagai badan kesehatan dunia menjadi ajang negara-negara untuk menjalankan kerjasama multilateral dalam menanggulangi pandemi dan ancaman transnasional. WHO juga bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam penyelesaian masalah kesehatan global, pembentukan agenda penelitian kesehatan, pengaturan norma dan standar, penerapan kebijakan berdasarkan bukti penelitian, serta monitoring dan evaluasi isu kesehatan yang sedang terjadi. Dalam mewujudkan agenda kesehatan global, Indonesia turut aktif di beberapa forum multilateral dan internasional, seperti *World Health Assembly (WHA)*, *Global Health Security Agenda (GHS)*, *Foreign Policy and Global Health (FPGH)*, *ASEAN Health Ministers Meeting*, hingga Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Laksono et al., 2018).

Pada tahun 2010-2014, Indonesia berfokus untuk meningkatkan peran dan diplomasi di tingkat multilateral dengan strateginya melalui peningkatan partisipasi aktif dan inisiatif di berbagai forum, termasuk mengupayakan menjadi tuan rumah dalam berbagai pertemuan multilateral. Indonesia juga berupaya untuk mensinergikan partisipasinya pada forum internasional dengan menekankan konsep akses dan pembagian keuntungan (Kemenlu, 2019).

Diplomasi kesehatan Indonesia dilakukan melalui berbagai organisasi hingga forum internasional dalam menangani masalah dan ancaman kesehatan yang terjadi untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi di masa mendatang. WHA merupakan forum perumusan kebijakan di bawah naungan WHO yang dihadiri oleh para delegasi anggotanya. Pada WHA ke-71 tahun 2019, Indonesia telah menyepakati tiga rencana aksi bersama dengan Belanda, Iran, dan Kuba dalam mengantisipasi ancaman kesehatan global dengan adanya penyakit baru yang muncul seperti SARS, H1N1, H5N1, Ebola, dan Zika. Selain itu, Indonesia juga mendukung adanya *Joint Venture* dalam pengembangan vaksin melalui industri farmasi dalam negeri.

Di samping itu, *Foreign Policy and Global Health Initiatives (FPGH)* hadir sebagai forum multilateral atas kebutuhan dunia dalam menghadapi masalah kesehatan global yang juga merupakan hasil dari Deklarasi Oslo tahun 2007 yang menjadi langkah pertama sinergi antara politik luar negeri dan kebijakan kesehatan global. Terdapat cita-cita untuk memperkuat komitmen bersama atas isu kesehatan dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman global melalui kacamata politik luar negeri.

Pada tahun 2020, Indonesia terpilih menjadi ketua FPGH dengan membawa gagasan untuk meningkatkan ketangguhan sistem kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat dengan berfokus pada tujuan yang digagas "*Affordable Healthcare for All*" (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021). Masih banyak kasus di dunia yang memperlihatkan kesenjangan akses kesehatan, sehingga masyarakatnya hidup dalam kerentanan dan kerapuhan. Kualitas kesehatan di setiap negara tentunya juga berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perekonomian, demografi penduduk, pendidikan, hingga letak geografis suatu negara.

Keketuaan Indonesia tersebut sebagai salah satu cara agar negara-negara di dunia, khususnya negara anggota FPGH menerapkan sistem kesehatan yang setara bagi warganya untuk menciptakan pertahanan atas keamanan kesehatan nasional maupun global. Alih kuasa jabatan tersebut bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Penularan penyakit yang berasal dari Tiongkok ini membuat tatanan kehidupan masyarakat berubah, di mana akses yang sangat terbatas untuk melakukan perjalanan lintas negara dan membuat perekonomian dunia seakan lumpuh. Di sisi lain, dunia kesehatan terus melakukan inovasi dan kolaborasi untuk dapat menangani pandemi, seperti promosi kesehatan untuk pencegahan penularan penyakit, penyediaan alat kesehatan, obat dan terapi pemulihan, hingga penelitian dan penyediaan vaksin untuk sebagai bentuk strategi ketahanan nasional.

Beberapa hal yang membuat forum ini unggul sebagai forum pertama yang mendeklarasikan isu kesehatan sebagai bagian dari politik luar negeri sehingga meningkatkan pembahasan kesehatan global atas kesadaran bahwa setiap harinya akan berhadapan dengan masalah dan ancaman kesehatan. FPGH juga menjadi wadah Indonesia untuk turut aktif dalam sektor kesehatan global. Di samping itu, dalam Sidang Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi tentang kebijakan luar negeri dan kesehatan global sejak pembentukan FPGH pada tahun 2007. Hal menarik lainnya adalah dengan adanya alih kuasa jabatan kepemimpinan dari Perancis ke Indonesia bertepatan dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Keadaan tersebut akan memfasilitasi Indonesia dalam upaya diplomasi kesehatan untuk menciptakan keamanan kesehatan dan menanggulangi dampak pandemi.

Menangani permasalahan pandemi Covid-19 merupakan tujuan dari seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Namun pada implementasinya, pandemi masih sulit diatasi karena terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara, baik dari segi kebijakan, tenaga kesehatan, maupun para ahli di bidang kesehatan. Maka dari itu, diperlukan upaya kerjasama antarnegara untuk menangani permasalahan pandemi ini. Terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas ini membuat Indonesia berinisiasi untuk menggagas tema *Affordable Healthcare for All* dalam keketuaannya di forum FPGH sebagai langkah awal dalam menangani pandemi COVID-19 secara global. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, karya ini menganalisis strategi yang digagas oleh Indonesia sebagai ketua forum inisiatif FPGH tahun 2020 dalam menangani pandemi Covid-19 sebagai implementasi keamanan kesehatan.

2. Diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pandemi covid-19 pada tahun 2020

2.1. Pandangan Diplomasi Kesehatan Indonesia

Penyebaran wabah flu burung di Indonesia pada tahun 2003 memiliki angka kematian sebesar 70% dari jumlah kasus yang terjadi. WHO mewajibkan setiap negara yang terkena wabah flu burung untuk mengirimkan sampel virus ke lembaga mitra, untuk mencegah pandemi virus. Kebijakan *virus sharing* berasal dari negara-negara berkembang yang dikirim kepada negara maju. Upaya pengkomersialisasi oleh produsen farmasi di luar negeri berada di luar pengetahuan Indonesia. Sampel genetis virus flu burung Indonesia yang dikirim ke WHO telah dikembangkan menjadi vaksin flu burung di Australia yang sampelnya didapatkan dari WHO. Upaya pengkomersialisasi oleh produsen farmasi di luar negeri berada di luar pengetahuan Indonesia. Oleh karena itu, pada Januari 2007 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Siti Fadillah Supari

mengambil langkah pemutusan kerjasama dengan WHO dalam analisis flu burung dan mengupayakan untuk mengubah mekanisme penanganan virus agar lebih adil dan setara.

Pada sidang WHA ke-60 pada Mei 2007, Indonesia mengajukan resolusi penanganan pandemi melalui "*Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other Benefits*" yang bertujuan untuk mendorong setiap negara agar membangun mekanisme virus sharing secara transparan dan adil. Resolusi mendapat dukungan dari 23 negara dan bersepakat membangun kerangka kerja dan mekanisme *benefit sharing* yang adil. Resolusi WHA No.64/56 tentang "*Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other Benefits*" berhasil ditetapkan melalui sidang WHA ke-64 yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan menjadi suatu pencapaian besar Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya untuk menghadapi ancaman kesehatan global dan menghentikan sistem yang dinilai tidak adanya keadilan, kesetaraan, dan transparan.

Setelah melewati jalan panjang dalam merealisasikan keamanan kesehatan dan menjalankan diplomasi kesehatan, melalui Pleno ke-65 Sidang Majelis Umum PBB Indonesia berhasil mengesahkan agenda kebijakan luar negeri dan kesehatan global dengan mengangkat tema "*Partnership for Global Health.*" Sidang yang diselenggarakan pada 11 Desember 2013 di New York tersebut mendorong agar terciptanya kemitraan global yang dapat mengatasi hambatan ekonomi dalam melaksanakan kesehatan global. Di samping itu juga menegaskan pentingnya kemitraan yang dapat mendukung tercapainya tujuan untuk semua pihak melalui penguatan sistem kesehatan, pengembangan dan inovasi, serta promosi kesehatan. Capaian Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB ini juga tidak terlepas dari keketuaan Indonesia dalam FPGH tahun 2013 dengan gagasan yaitu, "*access and benefit sharing.*"

Partisipasi aktif politik luar negeri Indonesia dalam menangani isu kesehatan global mengalami peningkatan dengan banyaknya keanggotaan terhadap pertemuan atau forum, baik yang bersifat formal maupun nonformal. Berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) telah mendorong negara-negara di dunia untuk menjalankan poin-poin tujuannya sehingga dapat menciptakan keadaan yang kondusif bagi pembangunan dunia. Poin kedelapan menyatakan membangun kemitraan global, diplomasi kesehatan yang dilakukan Indonesia sukses dengan agenda virus sharing, antisipasi pandemi, dan kerjasama global dalam menghadapi keadaan darurat kesehatan global.

Terjadinya pandemi pada awal tahun 2020 kembali menjadi pusat perhatian dunia terkait isu kesehatan global. Indonesia menjalankan politik luar negerinya dalam menangani pandemi dengan memangun diplomasi multilateral yang turut melibatkan WHO, GHSA, OKI, dan FPGH serta melibatkan peran ASEAN sebagai wadah kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik yang dibangun Indonesia pada masa pandemi Covid-19 bertujuan untuk kerjasama dalam rangka pengadaan alat pelindung kesehatan dan vaksin (Setiawan 2021). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai aktor yang menjalani dan menjembatani kepentingan nasional Indonesia di kancah internasional mendapatkan tugas untuk menangani dampak pandemi melalui diplomasi ekonomi dan kesehatan. Diplomasi yang dijalankan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat memanfaatkan keberadaan Foreign Policy and Global Health dalam rangka kerjasama multilateral untuk membangun tata kelola kesehatan global yang inklusif (Purba, 2023).

2.2. *Foreign Policy and Global Health Initiatives*

Foreign Policy and Global Health Initiatives (FPGH) merupakan sebuah forum multilateral yang diinisiasi oleh Menteri Luar Negeri Brazil, Perancis, Indonesia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, dan Thailand pada 20 Maret 2007 di Oslo, Norwegia. Forum ini berfokus pada isu kebijakan luar negeri dan kesehatan global yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bahwa investasi kesehatan adalah hal penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ancaman kesehatan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan keamanan global. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri terkait kesehatan haruslah kuat dan menjadi fokus dalam agenda internasional.

Para negara anggota menjalankan komitmennya dengan membangun kerjasama di level bilateral, regional, dan multilateral dengan melakukan tindakan di tingkat global agar siap menghadapi ancaman kesehatan global. Forum ini juga lahir sebagai jalan untuk mencapai target dari MDGs di mana kesehatan menjadi komponen utamanya dan ditetapkan dalam Deklarasi Oslo. Hal ini merupakan salah satu wujud pemerintah dalam menetapkan kebijakan luar negerinya dengan menekankan masalah kesehatan global.

Komitmen FPGH dalam kesehatan global dijalankan atas tiga area yang telah diidentifikasi berdasarkan jenis posisi kebijakan (Amorim et al. 2007). Pertama, FPGH mempersiapkan kapasitas untuk keamanan kesehatan global melalui aksi kolaboratif para menteri luar negeri dalam menghadapi bencana dan keadaan darurat, baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia. Kedua, menghadapi ancaman kesehatan global. Para pembuat kebijakan secara mendalam akan mengidentifikasi ancaman yang datang seperti konflik, bencana alam, lingkungan, serta HIV/Aids. Ketiga, FPGH berkomitmen untuk membuat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh manusia melalui pemerintahan untuk keamanan kesehatan global melalui tata kelola global.

Keikutsertaan Indonesia dalam FPGH merupakan langkah untuk menawarkan solusi bagi negara-negara berkembang dari ketergantungan terhadap negara maju. Indonesia berupaya untuk reaktualisasi sistem kesehatan global yang merugikan dengan merubahnya dengan sistem baru yang dapat menunjukkan keadilan bagi setiap negara. Sikap Indonesia ketika mengetahui adanya ketidakadilan dalam sistem *virus sharing* oleh WHO dengan melangsungkan protes dan menghentikan pengiriman virus ke WHO. Setelah keputusan tersebut, asisten direktur WHO Indonesia menemui pihak Indonesia untuk mencari jalan keluar yang berakhir pada kebuntuan. Keketuaan FPGH tidak memiliki sekretariat tetap, melainkan berganti setiap tahunnya bergiliran kepada setiap negara-negara anggota. Pertemuan dilaksanakan setiap tahun dan menjadi pertemuan khusus untuk mempromosikan kesehatan global melalui sidang WHO maupun WHA dengan satu tema spesifik sebagai fokus untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Pada tahun 2020 keketuaan FPGH dipegang oleh Indonesia dengan menggagas tema "*Affordable Healthcare for All*" yang bertujuan untuk melawan Covid-19 dengan resolusi untuk mewujudkan akses pelayanan kesehatan primer dan distribusi vaksin yang adil dan setara.

3. Analisis implementasi diplomasi kesehatan dan keamanan kesehatan melalui Foreign Policy and Global Health Initiatives tahun 2020

Diplomasi yang dijalankan Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 dapat memanfaatkan keberadaan *Foreign Policy and Global Health* dalam rangka kerjasama multilateral untuk membangun tata kelola kesehatan global yang inklusif. Indonesia sebagai ketua FPGH tahun 2020 menyoroti nilai-nilai penting multilateralisme dan kerjasama internasional yang menopang kerangka kerja

dalam menghadapi pandemi Covid-19. Dampak yang timbul seperti banyaknya korban meninggal, kehilangan mata pencaharian, dan terbatasnya lingkungan sosial menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan merupakan sebuah investasi jangka panjang. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada pidatonya dalam pembukaan FPGH MVM menyampaikan bahwa tantangan global di masa mendatang adalah dengan menyusun sebuah protokol atau panduan dalam menghadapi keadaan darurat (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020a). Seluruh negara dapat bergabung dengan WHO untuk membangun Jaringan Kota Global untuk Kesiapsiagaan Darurat Kesehatan. Panduan tersebut berisi tentang sistem kesehatan yang kuat dan perawatan kesehatan primer yang terjangkau dengan menyediakan layanan kesehatan esensial melalui kemampuan deteksi, respons, dan pencegahan.

Setiap tahunnya, FPGH menjadi inisiator satu resolusi dalam bidang kesehatan pada Sidang Umum PBB. Keketuaan Indonesia mengusung tema "*Affordable Healthcare for All*" dengan menjadikan akses yang adil terhadap obat-obatan, vaksin, dan teknologi kesehatan yang berkualitas, aman, dan efektif sebagai prioritas kerja dalam mengatasi pandemi. Komitmen yang dijalankan berdasarkan nilai solidaritas dengan komunitas internasional dalam menghadapi pandemi dan memperkuat kesiapsiagaan global dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai nilai-nilai dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2020 dengan tanpa meninggalkan siapapun untuk menerapkan *International Health Regulations* (2005).

Pada sidang *Executive Board* (EB) WHO ke-146, Indonesia sebagai ketua forum FPGH tahun 2020 menyampaikan pernyataan bersama dari negara-negara anggota FPGH bahwa mendukung WHO dalam menghadapi situasi kedaruratan kesehatan global dan menjalankan kerangka IHR 2005. Indonesia menyerukan dorongan bagi negara-negara untuk mengimplementasikan IHR 2005 yang menyatakan pentingnya kolaborasi dan bantuan antar negara, termasuk dalam keadaan darurat. Negara-negara anggota FPGH siap untuk bekerjasama dengan WHO dan komunitas global dalam langkah mitigasi pandemi Covid-19 (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020d).

Di samping pertemuan utama, terdapat pula pertemuan antara Menteri-menteri Kesehatan negara anggota FPGH dan pertemuan pembahasan jaminan kesehatan nasional. Dalam sesi *Joint Statement*, pertemuan yang diselenggarakan di sela-sela WHA ke-73 ini selain membahas respon dalam mengatasi pandemi dan pencapaian UHC, juga membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat, rekrutmen tenaga kerja yang kompeten, eksplorasi inovasi pengadaan obat dan vaksin, pemanfaatan teknologi digital, serta memastikan akses dan ketersediaan obat dan vaksin yang setara dan terjangkau (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2020b). Indonesia menggaet BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara dan memimpin pertemuan jaminan kesehatan dengan memperkenalkan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program pelayanan akses kesehatan. Selanjutnya, terdapat pembahasan terkait alternatif kerjasama di masa mendatang antara organisasi asuransi kesehatan dengan negara-negara anggota dalam menyediakan jaminan kesehatan berkelanjutan untuk memastikan warga negaranya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan tidak mengeluarkan biaya besar dalam perawatan kesehatan (Alamsyah, 2020).

Fenomena pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai masalah kebencanaan non-alam yang menjadi permasalahan transnasional. Berbagai

kebijakan ditetapkan secara global oleh WHO sebagai koordinator penanganan masalah kesehatan dunia. Kebijakan "Lockdown" ditetapkan dengan beberapa protokol kesehatan yang diantaranya membatasi pergerakan dengan adanya pembatasan kehidupan sosial masyarakat dan pembatasan akses keluar masuk lintas negara yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian.

Pandemi Covid-19 termasuk ke dalam isu *low politics* yang dalam penanganannya tidak memerlukan kekuatan militer sebagai senjata utama. Aktor negara dan aktor non negara saling membentuk aliansi untuk melantangkan urgensi terhadap penanganan pandemi secara cepat dan tepat. Fenomena ini menjadikan kesehatan sebagai isu esensial dalam penanganannya karena masalah utama berada pada penularan penyakit. WHO berperan sebagai badan yang dapat menangani masalah kesehatan berskala global dan memberikan solusi. Tata kelola kesehatan global menjadi perhatian saat ini karena membutuhkan keterlibatan aktor negara dan aktor non negara.

Kondisi setelah pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi dunia untuk membangun ketahanan nasional di tengah ancaman kesehatan, lesunya perekonomian dunia, dan krisis infrastruktur medis sebagai kebutuhan dasar dalam penanganan pandemi. Membangun hubungan dengan aktor lain menjadi pilihan terbaik bagi suatu negara untuk lepas dari belenggu Covid-19. Secara teoritis, diplomasi yang berkaitan dengan keamanan kesehatan mencakup empat komponen penting, yaitu normatif, bisnis, keamanan, dan strategis. Oleh karena itu, aktor kebijakan luar negeri harus bekerjasama dengan pelaku industri kesehatan, petugas kesehatan, ilmuwan, hingga unsur pendukung lainnya untuk menciptakan keadaan yang bebas ancaman kesehatan.

Rekam jejak diplomasi Indonesia pada bidang kesehatan mulai mengalami perkembangan sejak adanya kasus virus sharing yang melibatkan WHO atas ketidakmampuannya untuk menerapkan kebijakan yang adil dan transparan. Berangkat dari permasalahan tersebut, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan mengajukan resolusi *access and benefit sharing* untuk mempersiapkan penanganan pandemi kedepannya.

Disepakatinya resolusi Indonesia dalam sidang WHA ke-64 terkait "*Pandemic Influenza Preparedness: Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccine and other Benefits*" merupakan salah satu pencapaian besar dalam politik internasional. Resolusi tersebut diadaptasi untuk dijadikan bahan acuan atau pedoman untuk memperkuat sistem penanganan dan menghadapi ancaman biologis, khususnya pandemi influenza di masa depan. Di samping itu, bergabungnya Indonesia dalam FPGH yang menginisiasi kesehatan global masuk ke dalam ranah politik luar negeri merupakan aksi kolaboratif bersama dengan enam negara anggota lainnya. FPGH berperan sebagai inisiator topik kesehatan dalam pertemuan tahunan PBB yang menjadi fokus pembahasan masalah dunia dalam bidang kesehatan selama setahun. Selain itu, FPGH juga memiliki posisi penting dalam memimpin jalannya sidang dan menjadi acuan negara-negara anggota PBB untuk menjalankan politik luar negeri.

Pertemuan yang setiap tahunnya dilaksanakan melalui Sidang Umum PBB merupakan cara efektif dalam menjalankan tujuan FPGH melalui promosi kesehatan global dengan jangkauan audiens yang luas. Negara-negara yang hadir menjadi memahami masalah apa yang sedang terjadi di dunia dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah tantangan dalam menghadapi keamanan kesehatan global. Untuk menyikapi permasalahan yang ada, para delegasi dari setiap negara

dapat menyusun draf resolusi sebagai langkah penyelesaian. Pengusungan tema "*Affordable Healthcare for All*" pada tahun 2020 merupakan prioritas nasional dan global untuk memberikan layanan yang terjangkau sebagai kunci tercapainya UHC. Selain itu, bertujuan untuk membangun jaringan kerjasama yang lebih erat guna pencapaian ketersediaan layanan kesehatan dalam kerangka kerja FPGH.

Sepanjang pembentukannya, FPGH memiliki capaian besar dalam mewujudkan cita-cita dasar. Penulis melihat bahwa tujuan FPGH yang ingin mempromosikan isu kesehatan menjadi topik kajian dalam politik luar negeri telah terealisasi. Melalui pertemuan-pertemuan yang di tingkat internasional seperti Sidang Umum PBB, WHO, dan WHA membuat setiap negara di dunia menjadi peduli terhadap eksistensi masalah kesehatan yang secara tidak disadari sebelumnya dapat mempengaruhi stabilitas politik.

Selain memasukan kajian kesehatan dalam kebijakan luar negeri, kehadiran FPGH juga mempengaruhi negara-negara di dunia untuk membahasnya di luar Sidang PBB. Pembahasan tersebut diadopsi oleh berbagai organisasi regional dan multilateral untuk dapat mempersiapkan kerjasama dalam menghadapi masalah kesehatan. Contohnya seperti organisasi kawasan ASEAN terdapat *ASEAN Health Ministers Meeting* dan OKI dalam pertemuan khusus untuk membahas regulasi produksi obat-obatan dan vaksin (Purba, 2023). Kerjasama tersebut juga tidak terlepas dari keterlibatan aktor non negara. Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, Pfizer, Johnson & Johnson merupakan hasil kerjasama dalam menghasilkan vaksin sebagai kebutuhan mendesak dalam keadaan pandemi Covid-19.

Katz melalui penelitiannya telah mengklasifikasi tingkatan diplomasi kesehatan menjadi tiga level, yaitu *core diplomacy*, *multistakeholder diplomacy*, dan *informal diplomacy* yang dapat penulis analisis melalui upaya Indonesia dan FPGH dalam mengatasi pandemi (Katz et al., 2011). *Core diplomacy* telah terimplementasi melalui pertemuan resmi negara secara bilateral, regional, maupun internasional dengan melibatkan kepala pemerintahan, diplomat, dan atase kesehatan. Indonesia memiliki posisi strategis dalam FPGH, pertemuan kepala negara, hingga para menteri sebagai pembuat kebijakan. *Multi-stakeholder diplomacy* diimplementasikan melalui kerjasama antara aktor negara dan aktor non negara seperti organisasi internasional dalam melakukan penyelesaian masalah kesehatan. Contohnya seperti BPJS Kesehatan yang terlibat langsung dalam mewakili Indonesia sebagai lembaga jaminan kesehatan nasional di tingkat global. Selain itu, *COVAX Facility* untuk mewujudkan kesetaraan vaksin dunia. *Informal diplomacy* melakukan pendekatan akar rumput yang lebih dekat dengan masyarakat karena dapat turun langsung ke lapangan, seperti tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, perusahaan swasta, serta masyarakat itu sendiri. Sinovac dan Sinopharm terlibat sebagai industri farmasi untuk memproduksi vaksin demi ketahanan kesehatan global.

Dalam menciptakan suatu kebijakan, dibutuhkan sebuah strategi agar tujuan yang ingin dicapai dapat terealisasi. Menurut Lykke (2007), strategi tersusun atas hasil akhir yang diinginkan (*ends*), metode dalam mencapai tujuan (*ways*), dan membutuhkan sumber daya sebagai penggerak metode (*means*) (Eikmeier, 2007). Penulis menganalisis bahwa karya ini memiliki tujuan untuk menganalisis kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia pada keketuaannya di FPGH pada tahun 2020 dalam penanganan pandemi Covid-19. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan adalah dengan mempromosikan isu kesehatan global di level internasional dalam merespon fenomena pandemi melalui forum yang secara

khusus membahas isu kesehatan seperti WHO, WHA, dan GHSA. Sumber daya yang dimiliki untuk mensukseskan tujuan diantaranya yaitu sikap negara terhadap keamanan kesehatan global, komitmen bersama, dan aksi kolaborasi dari seluruh aktor terkait dengan memanfaatkan industri farmasi dan alat kesehatan serta organisasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian Fathun dan Nurmasari (2021), setiap negara harus menyamakan visi dan misinya menjadi satu tujuan besar dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan kesehatan. Kebijakan luar negeri saat ini tidak bisa dipisahkan dari isu kesehatan karena hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan di aspek sosial dan ekonomi serta dapat menjaga stabilitas keamanan dunia. Pelaksanaan keamanan kesehatan sangat membutuhkan hubungan multilateral karena melibatkan banyak pihak yang memiliki pengalaman berbeda dan berbentuk *sharing knowledge*.

Lebih lanjut, kebijakan luar negeri telah mencapai pada titik melayani tujuan kesehatan global dalam menghadapi masalah penyakit tidak menular, menghambat penularan penyakit, melakukan tindakan perawatan kesehatan, memberikan akses pelayanan kesehatan, dan mewujudkan UHC. Aksi tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan agar masyarakat bisa mendapatkan haknya (Fathun & Situmeang, 2021).

Wicaksana (2020) melalui penelitiannya mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan diplomasi kesehatan Indonesia di masa pandemi tidak berjalan secara signifikan. Pelaksanaan keamanan kesehatan Indonesia memiliki hambatan pada faktor-faktor politik dalam negeri sebagai landasan kebijakan luar negeri. Posisi Indonesia sebagai *middle power* dengan politik luar negeri bebas-aktif mengarahkan untuk loyal terhadap pendekatan institusionalisme asosiatif. Kajian kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Kementerian Luar Negeri RI hanya berfokus pada tatanan normatif dengan kemampuan membuat atau mensosialisasikan kebijakan. Dibutuhkan juga aplikasi langsung diplomasi kesehatan melalui hubungan multilateral maupun bilateral.

Selanjutnya, kebijakan yang ditetapkan Indonesia di dalam negeri tidak sejalan dengan arahan WHO yang mengarahkan setiap negara untuk menetapkan karantina wilayah secara ketat (*lockdown*) tidak dilaksanakan. Melainkan dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan berbagai pertimbangan melalui karakteristik daerah setempat. Kebijakan yang bertolak belakang tersebut secara tidak sadar akan menimbulkan dampak negatif dan mengurangi kepercayaan masyarakat, baik nasional maupun internasional terhadap pemerintah (Wicaksana, 2020).

4. Kesimpulan

Keterlibatan FPGH sebagai inisiator tema kajian yang diangkat dalam forum internasional telah mencapai target utamanya untuk membawa isu kesehatan dalam konstelasi politik dunia melalui diplomasi kesehatan. Usaha untuk memerangi pandemi Covid-19 melalui kolaborasi nyata merupakan wadah negara-negara anggotanya untuk menjalankan diplomasi kesehatan dan menunjukkan eksistensinya dalam dunia internasional. Peran Indonesia sebagai ketua dalam beberapa sidang bertujuan untuk menjalankan politik luar negeri Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa dalam menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia melalui keamanan kesehatan.

FPGH dalam perkembangannya telah memiliki beberapa capaian pada tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam mewujudkan *Affordable Healthcare for All*, Indonesia melalui FPGH telah menangani pandemi Covid-19 memiliki peran sebagai inisiator dengan keterlibatan berbagai aktor, seperti Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, industri farmasi, hingga kelompok masyarakat. Upaya mewujudkan sistem kesehatan yang terjangkau ditunjukkan melalui keterlibatan BPJS Kesehatan sebagai lembaga terkait jaminan kesehatan nasional dengan memperkenalkan program Kartu Indonesia Sehat serta membahas langkah alternatif dalam permasalahan asuransi kesehatan di masa mendatang.

Akses vaksin dan obat-obatan telah dikawal secara penuh oleh PBB dengan melibatkan kerangka kerja COVAX Facility yang menjamin distribusi vaksin global secara adil dan berdasarkan skala prioritas. Hal tersebut telah diimplementasi melalui kerjasama hubungan multilateral untuk membantu negara yang membutuhkan. Keterlibatan perusahaan vaksin merupakan hal penting dalam menyelenggarakan keamanan kesehatan dalam penyediaan stok vaksin global. Terciptanya kerjasama seperti Indonesia-China dalam mengembangkan vaksin Sinovac serta kerjasama kawasan seperti ASEAN untuk menjaga stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah langkah besar dalam penanganan pandemi.

Langkah kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19 melalui FPGH merupakan upaya menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dalam isu kesehatan global. Ketimpangan akses vaksin dan nasionalisme vaksin menjadi fokus yang disuarakan oleh Indonesia. Penguatan sistem kesehatan nasional menjadi landasan terciptanya sistem kesehatan global yang tangguh untuk menerapkan keamanan kesehatan. Di samping itu, Indonesia menyerukan aksi kolaborasi dan kemitraan seluruh pihak atau yang dikenal dengan pendekatan "*One Health*" dalam mengatasi pandemi dan mendorong negara anggota untuk membangun kesiapan dan ketahanan kesehatan terhadap ancaman biologi dan pandemi di masa mendatang.

Dalam perkembangannya, kebijakan Indonesia dalam menangani pandemi diapresiasi oleh WHO yang disampaikan oleh Tedros pada sidang HMM G20 tahun 2022 di Bali, Indonesia. Diplomasi kesehatan menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dengan menekankan pada penguatan arsitektur keamanan global melalui layanan kesehatan primer, seperti cakupan vaksinasi yang tinggi, pemberian *booster* vaksin untuk meningkatkan resistensi tubuh, serta sistem kesehatan nasional. Inisiasi Indonesia dalam berbagai forum internasional menjadi penggerak negara-negara untuk mengambil langkah dalam menghadapi pandemi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari keketuaan Indonesia dalam FPGH tahun 2020 yang menggagas tema kesetaraan akses dan layanan kesehatan.

Referensi

Buku

- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9).
- Kickbush, I., Lister, G., Told, M., & Drager, N. (2013). *Global Health Diplomacy*. Springer.
- Laksono, H., Maryadi, P., Dewi, E. D., Aryadi, T., Santikajaya, A., Fitri, W., &

- Putro, R. A. (2018). *Kesehatan untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia*. In Jakarta. BPPK Kemlu RI.
- Marsh, D. , & Stoker G. (2002). *Theory and Methods in Political Science* (2nd ed.). New York: Palgrave MacMillan
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edit). SAGE Publications.

Artikel Jurnal

- Amorim, C., Douste-Blazy, P., Wirayuda, H., Stare, J. G., Gadio, C. T., Dlamini Zuma, N., & Pibulsonggram, N. (2007). Oslo Ministerial Declaration-global health: a pressing foreign policy issue of our time. *Lancet*, 369(9570), 1373–1378. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(07\)60498-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60498-X)
- Eikmeier, D. (2007). A Logical Method for Center-of-Gravity Analysis. *Military Review*, 87(5), 62–66.
- Fathun, L. M., & Situmeang, N. (2021). *Concept of Global Health Diplomacy in International Relations*. 5(1), 1–19.
- Katz, R., Kornblet, S., Arnold, G., Lief, E., & Fischer, J. (2011). Defining Health Diplomacy: Changing Demands in the Era of Globalization. *The Milbank Quarterly*, 89(3), 503–523.
- Nurhikmah. (2018). *Upaya Indonesia Untuk Melawan Ketidakadilan Dalam Sistem Kesehatan Global* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <https://eprints.umm.ac.id/39758/>
- Roedyati, J. (2013). Keketuaan Indonesia Dalam Forum Foreign Policy Global Health Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 9(1), 96511.
- Setiawan, A. (2021). Peran Diplomasi Multilateral Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. *SENASPOLHI* 3, 1(1), 1–11.
- Taubenberger, J. K., & Morens, D. M. (2006). 1918 Influenza: the Mother of All Pandemics. *Emerging Infectious Diseases*, 12(1), 15–22. <https://doi.org/10.3201/eid1209.050979>
- Wicaksana, I. G. W. (2020). The Problem of Indonesia's Health Diplomacy in the Age of Pandemic: Masalah Diplomasi Kesehatan Indonesia di Era Pandemi. *Global Strategis*, 14(2), 275–288.

Webpages

- Amnesty International. (2018). *USA: Policy of seperating children from parents is nothing short of torture*. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/06/usa-family-separation-torture/>
- Patel, C. (2017). *Time for ASEAN to Take Human Rights Seriously*. Retrived from <https://thediomat.com/2017/02/time-for-asean-to-take-human-rights-seriously/>
- Alamsyah, I. E. (2020, Juni 2). *Dalam Forum FGPH, BPJS Kesehatan Perkenalkan Program JKN-KIS* . Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/qbaiqi349/dalam-forum-fgph-bpjs-kesehatan-perkenalkan-program-jknkis>
- Chairunnisa, N. (2020, April 10). *Jamin Pasokan Alat Medis, Indonesia Kerja Sama dengan 9 Negara*. tempo.com. <https://nasional.tempo.co/read/1330083/jamin-pasokan-alat-medis-indonesia-kerja-sama-dengan-9-negara>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021, Januari 20). *Indonesia Pimpin Foreign Policy and Global Health Dukung Upaya Global Akhiri Pandemi*

COVID-19 – Sehat Negeriku. kemkes.go.id.

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200518/3033922/indonesia-pimpin-foreign-policy-and-global-health-dukung-upaya-global-akhiri-pandemi-covid-19/>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Kerja Sama Multilateral*. https://kemlu.go.id/portal/id/page/21/kerja_sama_multilateral

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020a). *Foreign Policy and Global Health Ministers' Virtual Meeting (FPGH MVM)*. kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/oslo/en/news/8305/foreign-policy-and-global-health-ministers-virtual-meeting-fpgh-mvm>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020b). *Joint Statement Menteri Kesehatan Foreign Policy and Global Health (FPGH) Initiative*. kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/oslo/id/news/6897/joint-statement-menteri-kesehatan-foreign-policy-and-global-health-fpgh-initiative>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2020, Februari 6). *Indonesia emphasizes support for WHO in dealing with health emergencies*. kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/portal/en/read/1027/berita/indonesia>

World Health Organization. (2017, Februari 3). *Determinants of Health*. World Health Organization. <https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/determinants-of-health>

Interview

Hanna Puspita 2023 Di Direktorat Sosial Budaya Direktorat Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri.

